

PERAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Fitri Zahwatul Aulia
fitrizahwatulaulia@gmail.com
Nur Handayani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research was conducted at a Government institution, namely the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Surabaya. It located at Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya. Therefore, it aimed to analyze the role of the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Surabaya in presenting the financial statements of the Local Government. The research was qualitative. Furthermore, the instrument in the data collection method was through interviews with related parties; and documentation of financial statements of the Local Government that had been made during 2019-2022. The result showed that the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Surabaya had its role in presenting the financial statements of the Local Government. Moreover, during the presentation, it was found that there was a lack of understanding of human resources (SDM) in fully comprehending the accrual basis. Fortunately, this could be handled by having socialization and creating an EAccounting application to make the process easier.

Keywords: BPKAD, financial statements, presentation

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan pada instansi pemerintahan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Dengan pengambilan data melalui wawancara kepada pihak terkait serta dari dokumentasi laporan keuangan yang telah dibuat. sampel yang digunakan ialah laporan keuangan pemerintah daerah mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Surabaya memiliki peran dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dalam proses Penyajiannya ditemukan adanya masalah serta kendala yang dihadapi ialah kurangnya pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memahami basis akrual secara penuh. Akan tetapi hal tersebut dapat diatasi dengan melakukan sosialisasi serta menciptakan aplikasi E-Accounting guna untuk memudahkan dalam pengerjaannya.

Kata Kunci: BPKAD, laporan keuangan, penyajian

PENDAHULUAN

Instansi pemerintahan merupakan suatu lembaga yang berada di ruang lingkup pemerintah yang mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan semua kegiatan administratif dalam sektor eksekutif baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Badan layanan umum merupakan bagian dari instansi pemerintahan, yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat baik jasa maupun barang tanpa mengutamakan keuntungan atau laba. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah diselenggarakan secara tertip, efisien, ekonomis, efektif, transparan, serta akuntabel dengan memperlihatkan keadilan, akal sehat, kepentingan masyarakat serta ketaatan dalam

peraturan perundang-undangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun oleh pemerintah daerah secara keseluruhan serta transparan.

Dalam penelitian ini objek penelitian diambil dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau yang disingkat dengan nama BPKAD. Dimana BPKAD ialah suatu organisasi yang mempunyai peran penting dalam pengelolaan keuangan daerah serta aset. Serta mempunyai peran dalam penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan pertanggung jawaban serta pelaporan APBD. Oleh karena itu BPK merupakan Badan Layanan Umum yang mengharuskan menyusun laporan keuangan sebagai bentuk dari tanggung jawab. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan salah satu organisasi di instansi pemerintah daerah yang berkedudukan sebagai pelaksana dibidang pengelolaan dan keuangan dan aset daerah, yang meliputi bidang pendapatan, belanja, keuangan, serta seluruh aset daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi sebagai entitas pelaporan yang menyelenggarakan laporan keuangan pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan sebelum diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010, seluruh instansi pemerintahan mengacu pada Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 24 Tahun 2005 yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 menggunakan basis kas menuju akrual basis yang memuat 4 Laporan Keuangan diantaranya Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Neraca, Laporan Arus Kas serta Catatan atas Laporan Keuangan. Akan tetapi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 dianggap kurang tepat karena masih menggunakan basis kas, dimana pengakuan akan diakui apabila kas atau setara kas telah diterima atau dikeluarkan. Hal ini dapat memicu kesalahan pencatatan maupun adanya transaksi yang terlewat untuk dicatat oleh karena itu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 diubah menjadi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010, yang mengalami perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual secara penuh. Penerapan di setiap lembaga negara atau daerah sangat erat kaitannya dengan model pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Model pengelolaan keuangan Pelayanan Publik memberikan fleksibilitas dalam bentuk kebebasan untuk melakukan praktek bisnis yang sehat sehingga meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam mencapai pengelolaan keuangan yang baik, pemerintah menetapkan standar, pedoman, serta prinsip yang menjadi acuan setiap organisasi pemerintah dalam menyusun laporan keuangan. Untuk itu diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia (RI) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kemudian dibuatlah peraturan yang membawa perubahan besar pada sistem informasi keuangan. Penetapan Standar Akuntan Publik (SAP) didukung oleh struktur Standar Akuntan Publik berbasis Akrual yang disajikan dalam 12 (dua belas) Pernyataan Standar Akuntan Publik (PSAP) pada Lampiran I PP 71 Tahun 2010. Dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, maka wajib untuk menerapkan SAP Berbasis Akrual di Pemerintahan dan seluruh instansi pemerintah serta satuan kerja. Oleh karena itu, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai acuan dalam penyajian laporan keuangan dalam instansi pemerintah

Secara umum Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 didalamnya memuat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPAKD) merupakan lembaga di lingkungan pemerintah pusat/daerah yang mengelola aset negara/daerah yang tidak dipisahkan. Sebagai lembaga pemerintah, BPKAD mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 penyajian Laporan Keuangan. Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban yang disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh

gambaran yang jelas bagaimana peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam penyajian Laporan Keuangan Daerah, serta menganalisis kendala-kendala yang dihadapi serta upaya yang diperlukan untuk mengatasinya penyajian Laporan Keuangan Daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan demi menyajikan Laporan Keuangan Daerah yang Baik.

Diharapkan adanya manfaat dengan adanya penelitian ini diantaranya: (1) Bagi Pemerintah Kota Surabaya, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan umpan balik yang baik bagi Pemerintah Kota Surabaya, (2) Penelitian ini mempunyai manfaat dan berguna untuk meningkatkan pemahaman bagi pembaca maupun bagi peneliti, serta bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian mengenai peran BPKAD dalam menyajikan Laporan Keuangan Kota Surabaya, (3) Penelitian ini dilakukan guna untuk mengetahui peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya dalam menyajikan Laporan Keuangan Kota Surabaya.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait Peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis dapat merumuskan masalah antara lain: (1) Bagaimana peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya dalam penyajian Laporan Keuangan Kota Surabaya?, (2) Masalah apa saja yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?, (3) Upaya apa yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya agar sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010?. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: (1) Menganalisis peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya dalam penyajian Laporan Keuangan Kota Surabaya, (2) Menganalisis masalah apa saja yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, (3) Menganalisis upaya apa saja yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya agar penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Surabaya sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010.

TINJAUAN TEORITIS

Entitas Sektor Publik

Menurut Selmita (2022) Entitas Sektor Publik merupakan suatu organisasi yang berhubungan dengan kepentingan umum dalam menyediakan barang serta jasa serta melakukan pelayanan kepada publik. Sedangkan secara umum entitas sektor publik merupakan bagian dari perekonomian yang menyediakan berbagai layanan pemerintah untuk Masyarakat, serta banyak organisasi maupun badan yang berpedan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan baik. Sedangkan secara umum Entitas sektor publik merupakan organisasi atau lembaga yang beroperasi di lingkungan sektor publik atau pemerintahan. Entitas sektor publik mempunyai tanggung jawab atas penyediaan layanan publik serta pengelolaan sumber daya publik untuk kepentingan masyarakat. Contoh entitas sektor publik antara lain adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta lembaga non-profit yang didanai dan dinaungi oleh pemerintah. Entitas Sektor Publik merupakan suatu organisasi yang buka fokus untuk mencari laba maupun keuntungan, melainkan Entitas Sektor Publik fokus kepada kesejahteraan Masyarakat.

Sebagai salah satu contoh yang diambil dalam penelitian ini ialah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), yang merupakan salah satu Organisasi sektor publik yang berada didalam instansi pemerintah daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mempunyai tugas utama ialah merencanakan, mengelola, dan mengawasi

pengelolaan keuangan dan aset daerah agar berjalan dengan baik serta efisien. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) biasanya memiliki fungsi-fungsi seperti penyusunan anggaran, pengelolaan kas daerah, pengawasan terhadap pengeluaran serta penerimaan daerah, pengelolaan aset daerah, serta pelaporan keuangan dan aset daerah kepada pihak yang berwenang. Yang diharapkan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat dilakukan dengan lebih transparan, akuntabel, serta efisien sehingga dapat mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan dan lebih baik kedepannya.

Entitas Sektor Publik berfungsi sebagai satuan kerja kementerian Negara/Lembaga yang bertujuan menyelenggarakan pelayanan publik yang dikelola berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh badan pengelola terkait. Entitas Sektor Publik ikut berperan dalam mencapai tujuan kementerian Negara/Lembaga. Entitas Sektor Publik menyusun Rencana Strategi Bisnis (RSB) 5 tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga mencakup: (1) Keterkaitan dengan Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga, (2) Visi, misi, program, sasaran strategis, (3) Evaluasi pelaksanaan RSB sebelumnya, (4) Analisis strategis bisnis, (5) RSB yang dirinci 5 (lima) tahun dan indikator kinerja yang terukur. Pada Entitas Sektor Publik menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Bisnis (RSB). RBA paling sedikit mencakup program, kegiatan, indikator kinerja utama, target kinerja, anggaran penerimaan/pendapatan, anggaran pengeluaran/belanja, perkiraan saldo kas awal, dan saldo kas akhir, perkiraan periode BLU, ambang batas serta perkiraan RBA untuk tahun selanjutnya.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 yang bersifat sementara, dimana dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 menggunakan basis kas menuju akrual yang dinilai masih kurang tepat dalam penerapannya. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan standar yang menjadi acuan dalam penyajian laporan keuangan dalam instansi pemerintah. Diterbikannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 menurut lampiran 1 menyebutkan bahwa peranan serta tujuan dari pelaporan keuangan daerah ialah akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi, serta sebagai evaluasi kerja.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 ada beberapa poin penting diantaranya (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010, (2) Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara efisien, efektif, dan bertanggung jawab, (3) Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan lembaga pengawasan keuangan daerah lainnya, (4) Penggunaan dana APBD harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (5) Pemerintah daerah harus menyusun laporan keuangan secara berkala dan mempublikasikan laporan keuangan tersebut kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Pasal 1 Ayat 8 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, liabilitas, dan kepemilikan ekuitas dalam laporan keuangan dengan basis akrual, sebagai serta pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan dalam laporan pelaksanaan. anggaran berdasarkan dasar yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur tentang dasar akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan pemerintah, khususnya dasar kas untuk akuntansi belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Pasal 1 Ayat 8 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual adalah SAP yang mengakui

pendapatan, beban, aset, liabilitas, dan kepemilikan ekuitas dalam laporan keuangan dengan basis akrual, sebagai serta pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan dalam laporan pelaksanaan. anggaran berdasarkan dasar yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur tentang dasar akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan pemerintah, khususnya dasar kas untuk akuntansi belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Pernyataan Standar Akuntansi Berbasis Akrual tentang Penyajian Laporan Keuangan dalam instansi pemerintah daerah bertujuan untuk menyederhanakan pelaporan keuangan instansi pemerintah daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan serta transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pemerintah. Sedangkan menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintah (2007) bahwa Laporan Keuangan pemerintah Daerah merupakan laporan keuangan gabungan atau yang disebut dengan konsolidasi dari semua laporan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun Penjabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Secara umum laporan keuangan merupakan suatu catatan informasi mengenai keuangan suatu instansi selama satu periode.

Menurut KSAP (2021:35) serta terkandung dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 komponen yang ada dalam laporan keuangan pemerintah diantaranya:

- a. Laporan Realisasi anggaran
- b. Laporan Saldo anggaran Lebih
- c. Laporan Neraca, Laporan Operasional
- d. Laporan Arus Kas
- e. Laporan Perubahan Ekuitas
- f. Catatan atas Laporan Keuangan

Menurut KSAP (2021:38) Laporan keuangan disajikan minimal setahun sekali. Dalam situasi tertentu, ketika tanggal pelaporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan untuk periode lebih atau kurang dari satu tahun, entitas pelapor harus memberikan informasi mengenai alasan untuk tidak menggunakan periode laporan tidak satu tahun serta fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Laporan Realisasi Anggaran

Menurut KSAP (2015:6-10) Laporan Realisasi Anggaran BLU menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/deficit-LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Adapun pos-pos dalam laporan realisasi Anggaran (LRA) diantaranya: Pendapatan LRA, Belanja, Surplus/Deficit LRA, Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan, Pembiayaan Netto, SILPA/SIKPA. Pendapatan LRA Badan Layanan Umum diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLU diakui sebagai pendapatan oleh bendahara umum, untuk belanja diakui pada saat pengeluaran, sedangkan Surplus/deficit-LRA merupakan selisih antara pendapatan LRA dan Belanja LRA selama satu periode pelaporan dicatat, untuk penerimaan serta pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan, dan untuk pembiayaan netto Merupakan selisih kurang/lebih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pencatatan

Laporan Saldo Anggaran Lebih

Menurut KSAP (2015:11) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih memberikan informasi mengenai kenaikan maupun penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Badan Layanan Umum menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya, memuat pos-pos diantaranya: Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang pembiayaan Tahun Sebelumnya, Lain-lain, Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Laporan Neraca

Menurut KSAP (2015:11-13) Pada Laporan Neraca disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya dengan pos-pos diantaranya: Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang dari Kegiatan, Persediaan, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Aset Lainnya, Kewajiban Jangka Pendek, Kewajiban Jangka Panjang, Ekuitas. Laporan keuangan Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas mengenai asset, kewajiban serta ekuitas. Dari Laporan Neraca dapat mengetahui kondisi suatu asset, kewajiban serta ekuitas suatu instansi.

Laporan Operasional

Menurut KSAP (2015:14-16) Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas serta penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat dan juga daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Adapun pos-pos yang dimuat didalam laporan operasional diantaranya: Pendapatan Operasional, Beban, Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional, Kegiatan Non Operasional, Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa. Pos Luar Biasa, Surplus/Defisit LO.

Laporan Arus Kas

Menurut KSAP (2015:16-20) Laporan Arus Kas pada Badan Layanan Umum menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, serta setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan juga setara kas pada tanggal pelaporan pada BLU. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Laporan Perubahan Ekuitas

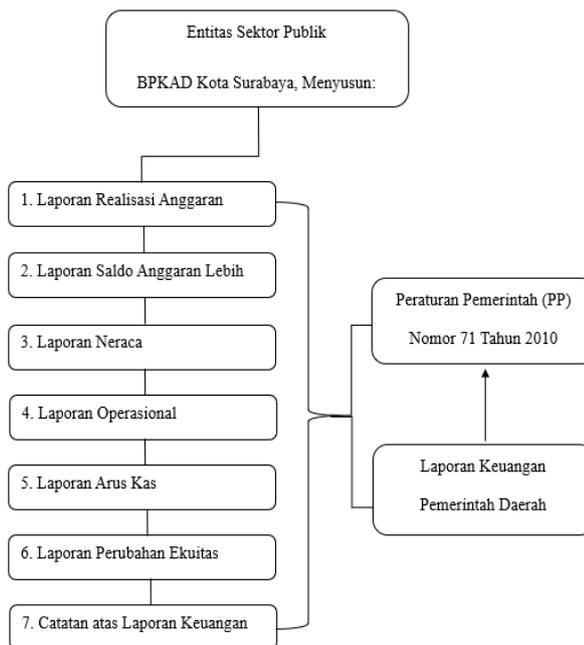
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun pos-pos yang ada didalam Laporan Perubahan Ekuitas diantaranya: Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan, Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi, ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, dan Ekuitas Akhir.

Catatan atas Laporan Keuangan

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan berisikan mengenai informasi tambahan mengenai laporan keuangan guna untuk mempermudah pengguna laporan keuangan dalam membaca perhitungan laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan didalamnya memuat informasi mengenai kebijakan, pencapaian target serta hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.

Rerangka Penelitian

Rerangka penelitian ini memberikan gambaran mengenai peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Surabaya dalam penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan dan ketetapan yang ada.



Gambar 1
Rerangka Penelitian

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran Populasi (Objek) Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis peran Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Menurut Sugiyono (2017) metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif menekankan pemahaman makna, dan mengkonstruksi fenomena dari pada generalisasi. Sedangkan menurut (Denzin & Licoln 1987) menyatakan bahwa penelitian kualitatif yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Objek penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya dimana fokus dari penelitian ini ialah peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya dalam penyajian Laporan Keuangan Daerah. Menurut Sugiyono (2013) populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik simpulannya.

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer dan sekunder. Diperoleh dengan cara peneliti melakukan interaksi dengan narasumber untuk memperoleh data yang relevan serta dari hasil laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Surabaya mulai dari tahun 2019 - 2022. Untuk memperoleh data yang relevan sesuai dengan penelitian yang dilakukan maka data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer yaitu Data Sekunder adalah data yang sudah tersedia, yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh peneliti lain dan tersedia untuk dapat

digunakan dalam penelitian orang lain. Data sekunder merupakan data historis yang dikumpulkan di masa lalu. Sedangkan menurut Suliyanto (2018) data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian. Laporan keuangan BPKAD merupakan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini sebagai data sekunder yang diperoleh. Sedangkan data primer adalah jenis yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber utama melalui wawancara, survey, eksperimen, dll. Sedangkan menurut Suliyanto (2018) data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertamanya. Dalam penelitian ini Bendahara Umum serta pihak yang berkepentingan dalam penyusunan laporan keuangan yang terkait dengan penelitian merupakan informan penelitian ini dari BPKAD Kota Surabaya.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dari wawancara serta dokumen. Wawancara merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab kepada narasumber maupun informan yang sebelumnya sudah ditentukan. Wawancara dapat juga dikatakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya. Menurut para ahli, Suliyanto (2018) wawancara merupakan teknik pengambilan data dimana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk mengali informasi dari responden. Sedangkan menurut Estenberg dalam Sugiyono (2013) wawancara didefinisikan sebagai pertemuan 2 orang yang bertukar informasi atau ide melalui tanggung jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Peneliti akan melakukan wawancara kepada para penyusun laporan keuangan dari instansi BPKAD Surabaya. Sedangkan Dokumen merupakan suatu catatan peristiwa yang sudah terjadi. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar maupun karya. Menurut Sugiyono (2021) dokumentasi adalah peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif ini. Hasil penelitian dari wawancara yang dilakukan akan lebih dapat dipercaya apabila didukung dengan foto-foto atau bukti yang ada. Dalam penelitian kali ini sumber dokumentasi ialah laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya mulai periode 2019 - 2022. Dokumentasi yang di gunakan dalam penelitian ini seperti laporan keuangan pemerintah Daerah Kota Surabaya, catatan transaksi, catatan hasil wawancara, foto dan juga dokumen lainnya yang diperoleh pada saat dilakukannya penelitian.

Informan dalam penelitian ditujukan untuk memberikan informasi terkait fenomena maupun masalah yang diangkat dalam penelitian. Seorang informan merupakan pihak yang memberikan informasi. Dalam penelitian ini informan yang akan di wawancara untuk memperoleh data mengenai Peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam penyajian Laporan Keuangan Pemeintah Daerah. Dalam wawancara kali ini informan akan diwakili oleh Bendahara Umum/pihak Akuntansi yang berada di Instansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Surabaya serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyusunan laporan keuangan di BPKAD Kota Surabaya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

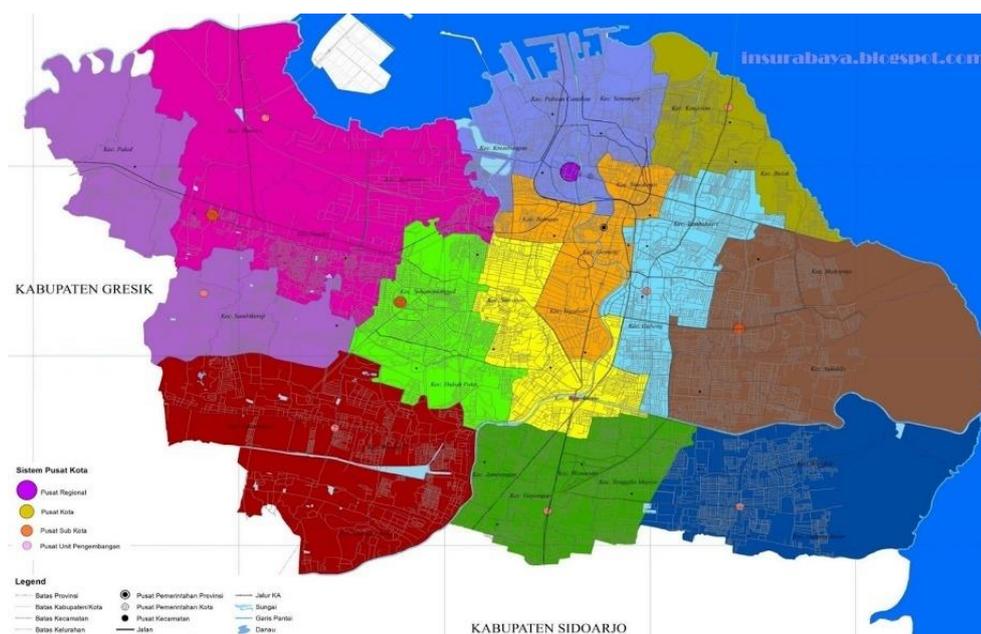
Gambaran Umum Kota Surabaya

Kota Surabaya merupakan ibu kota dari provinsi Jawa Timur. Letak kota Surabaya berada di pantai utara pulau Jawa bagian timur. Surabaya berbatasan dengan selat Madura jika dari arah utara, berbatasan dengan Selat Madura dan Laut Jawa dari arah timur, sedangkan dari arah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo dan dari arah barat berbatasan dengan Kabupaten Gresik. Kota Surabaya terletak antara 7°9' dan 7°21' Lintang Selatan dan 112°36' dan 112°54' Bujur Timur. Wilayahnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 3 hingga 6 meter di atas permukaan laut, kecuali di bagian selatan yang berkisar

antara 25 hingga 50 meter di atas permukaan laut. Luas kota Surabaya yaitu 326,81 km². Dari total luas wilayah kota Surabaya secara keseluruhan, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Surabaya pada tahun 2023 dibagi menjadi 31 kecamatan serta 154 kelurahan. Dimana Kecamatan dengan wilayah terluas ialah Kecamatan Benowo dengan luas wilayah kurang lebih 23,73 km². Sedangkan kecamatan dengan wilayah yang paling kecil ialah kecamatan simokerto dengan luas wilayah hanya 2.59 km². Menurut data dari Badan Pusat Statistik Surabaya tahun 2020 kota Surabaya terdiri dari 9.107 Rukun Tetangga (RT) dan 1.360 Rukun Warga (RW). Gambaran dari wilayah kota Surabaya yaitu sebagai berikut:

Gambaran Umum dan Profil BPKAD Surabaya

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya merupakan badan yang bergerak dalam ruang lingkup instansi pemerintah serta bertugas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah kota Surabaya, serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Walikota Surabaya. Disamping itu BPKAD Juga memiliki fungsi lain untuk menyelenggarakannya diantaranya Menyusun kebijakan teknis yang sesuai dengan lingkup tugasnya, pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tugasnya, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai yang sesuai dengan tugasnya serta melaksanakan administrasi badan yang sesuai dengan lingkup tugasnya. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Surabaya merupakan instansi pemerintahan yang mengatur tentang pengelolaan daerah kota Surabaya dari hasil pendapatannya serta mengelola aset yang dimilikinya. BPKAD sendiri merupakan bagian dari pemerintahan, dimana mempunyai susunan struktur seperti organisasi pemerintahan lainnya. Sebagaimana setiap instansi mempunyai struktur yang menunjukkan adanya pembagian tugas serta tanggung jawab kepada setiap bagian. Berikut gambaran dari wilayah kota Surabaya yaitu :



Gambar 2
Aplikasi E-Accounting BPKAD Kota Surabaya
 Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya mempunyai visi dan misi, adapun visinya ialah “Gotong Royong Menuju Kota Dunia yang Maju, Humanis, dan Berkelanjutan”. Misi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya diantaranya: (1) Mewujudkan Perekonomian Inklusif Untuk

Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat dan Pembukaan Lapangan Kerja Baru Melalui Penguatan Kemandirian Ekonomi Lokal, Kondusifitas Iklim Investasi, Penguatan Daya Saing Surabaya Sebagai Pusat Penghubung Perdagangan dan Jasa Antar Pulau Serta Internasional. (2) Membangun SDM Unggul Berkarakter, Sehat Jasmani Rohani, Produktif, Religious, Berbudaya Dalam Bingkai Kebhinekaan Melalui Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan, Pendidikan Serta Kebutuhan Dasar Lainnya. (3) Memantapkan Penataan Ruang Kota yang Terintegrasi Melalui Ketersediaan Infrastruktur dan Utilitas Kota yang Modern Berkelas Dunia Serta Berkelanjutan. (4) Memantapkan Transformasi Birokrasi yang Bersih, Dinamis, dan Tangkas Berbasis Digital Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. (5) Menciptakan Ketertiban, Keamanan, Kerukunan, Sosial dan Kepastian Hukum yang Berkeadilan.

Peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan merupakan suatu bagian informasi Perusahaan dalam satu periode akuntansi yang telah ditentukan untuk mengetahui kinerja dari perusahaan / instansi tersebut. Tujuan disajikan laporan keuangan pada pemerintah daerah ialah bertujuan untuk menyajikan mengenai informasi posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih (SAL), arus kas, hasil operasi serta perubahan ekuitas suatu instansi. Yang mempunyai manfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam membuat serta mengevaluasi keputusan alokasi sumber daya. Secara umum laporan keuangan dapat disimpulkan sebagai dokumen tertulis yang memuat informasi mengenai laporan keuangan suatu Perusahaan maupun instansi yang berisikan posisi keuangan, kinerja keuangan serta perubahan ekuitas dan arus kas pada periode tertentu.

Dalam penyajian laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Surabaya mempunyai peran dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah Daerah menyajikan laporan keuangan daerah dibantu oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan telah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010, hal ini dapat dilihat dalam penyajian 7 laporan keuangan yang disajikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Surabaya, diantaranya: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Catatan atas Laporan Keuangan (CaKL). Menurut laporan keuangan yang telah dibuat dan telah disajikan sudah sesuai dengan komponen penyajian laporan keuangan dalam Pernyataan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010. Berdasarkan hasil analisa yang diambil dalam dokumen laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. 7 laporan laporan keuangan yang telah disajikan telah memenuhi pos-pos yang seharusnya ada didalam KSAP (2015). Berikut ini merupakan penjabaran dari laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya yang menurut analisa sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010: (a) Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan hasil analisa yang diambil dalam dokumen laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang telah disajikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya telah menyajikan sesuai dengan pos-pos seperti pendapatan-LRA, Belanja, Surplus/Defisit LRA, serta Sisa lebih/Kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) yang telah sesuai dengan standar, (b) Penyajian Laporan Keuangan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL) yang disajikan mulai tahun 2019 sampai dengan 2022 sudah di sajikan secara komparatif dan sudah memenuhi kriteria menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 yang berisikan pos-pos seperti: Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa

Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA), Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, Lain-lain, Saldo Anggaran Lebih Akhir, (c) Laporan Neraca yang telah dibuat dan disajikan oleh BPKAD bertujuan untuk menyajikan serta menggambarkan posisi keuangan mengenai asset, kewajiban dan ekuitas. Dalam laporan keuangan Neraca tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 penyajiannya telah memuat 10 pos yang sesuai dengan ketentuan yang ada pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010, (d) Menurut data laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Surabaya Tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, dalam Laporan Operasional (LO) yang disajikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Surabaya pada Laporan Keuangan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 telah sesuai dengan komponen yang ada didalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 yaitu ada 7 pos diantaranya: Pendapatan LO, Beban, Surplus/Defisit kegiatan Operasional, Kegiatan nonoperasional, Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa, Pos Luar Biasa, Surplus/Defisit LO, (e) Untuk Laporan Arus Kas menurut bukti laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Surabaya mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 komponen yang disajikan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 serta pos-pos yang ditulis telah memenuhi yang telah ditetapkan dalam paragraf 91 yaitu Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan serta Aktivitas Transitoris, (f) Dalam Laporan Perubahan Ekuitas pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 yang disajikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Surabaya terdiri dari pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit, dampak kumulatif kesalahan mendasar serta dampak kumulatif perubahan kebijakan dan diperoleh ekuitas akhir. Dilihat dari komponen pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan perubahan ekuitas telah memenuhi standar yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010, (g) Dalam laporan keuangan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) memuat tentang semua informasi dari laporan keuangan yang telah dibuat sebelumnya seperti informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK).

Masalah atau kendala yang dihadapi oleh BPAKD dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam penyusunan laporan keuangan yang baik dan sesuai dengan standar yang ada tidak luput dari masalah maupun kendala yang dihadapi baik dalam Instansi maupun di Perusahaan. Ada banyak pemicu timbulnya masalah serta kendala yang dihadapi seperti kurangnya kelengkapan data yang diperoleh, kurangnya pemahaman tentang analisis keuangan, fraud dan masih banyak lagi lainnya. Dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah tidak terlepas dari kendala serta masalah yang dihadapi dalam proses penyusunannya. Berdasarkan dari hasil informasi yang diperoleh melalui wawancara dari pihak yang terkait, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya. Kendala serta masalah yang dihadapi tidak terlalu banyak ada, kendala serta masalah terletak pada penyampaian informasi keuangan serta pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memahami tentang penerapan basis akrual secara penuh yang sebelumnya menggunakan campuran basis kas dan akrual. Kurangnya pemahaman pada Sumber Daya manusia (SDM) karena adanya perubahan dari basis kas yang dirubah ke basis akrual secara penuh, sehingga beberapa SDM mengalami sedikit kendala yang berkaitan dengan kurangnya pemahaman mengenai basis akrual dalam penerapannya. Hal tersebut seperti yang di sampaikan oleh salah satu Staf Akuntansi berikut ini:

“Salah satu permasalahan yang ada ya kompetensi Sumber Daya Manusia kurangnya pemahaman SDM hal itu terjadi karena terkadang SDM nya ganti sehingga mengulang lagi untuk mengajari karna ada yang tidak paham mungkin missal dalam penjurnalan transaksinya, Upaya yang

dilakukan ya dengan mengajari ulang seiringnya berjalannya waktu.” Arlina - (Wawancara, 29 November 2023)

Pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pada waktu awal penerapan basis akrual secara penuh yang awalnya menggunakan basis kas dan akrual sedikit mengalami kendala karena kurangnya pemahaman oleh SDM terkait. Kurangnya pemahaman pada Sumber Daya manusia (SDM) karena adanya perubahan dari basis kas yang dirubah ke basis akrual secara penuh, sehingga beberapa SDM mengalami sedikit kendala yang berkaitan dengan kurangnya pemahaman mengenai basis akrual dalam penerapannya

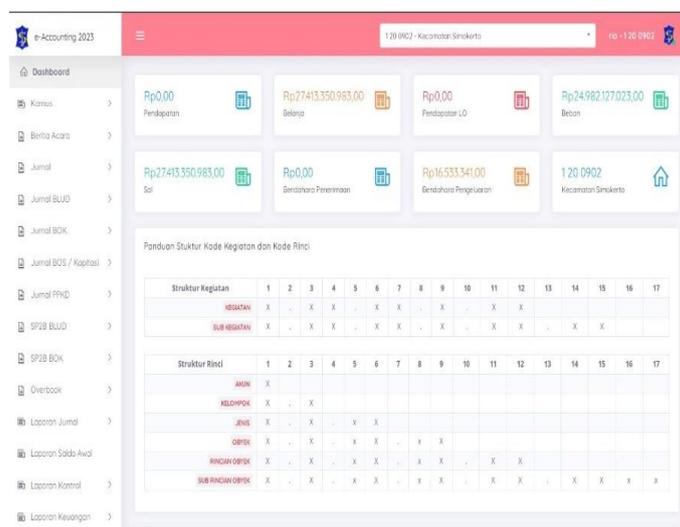
Upaya Yang Dilakukan BPKAD Kota Surabaya Dalam Penyusunan Serta Penyampaian Laporan Keuangan Agar Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010

Berdasarkan pada permasalahan yang ada yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya, ada upaya yang dilakukan untuk mengatasi serta meminimalisir kemungkinan yang tidak diinginkan terjadi. Ada beberapa Upaya yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya. Ada beberapa Upaya yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya. Diantaranya upaya yang dilakukan karena kurangnya pemahaman dari Sumber Daya Manusia (SDM) dilakukannya sosialisasi apabila diperlukan. Serta melakukan pendampingan bagi Sumber Daya Manusia yang baru dan kurang paham mengenai penyajian laporan keuangan agar sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 yang didampingi oleh staf akuntansi senior maupun ketua akuntansi dari instansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya, baik secara online maupun offline apabila diperlukan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan yang tidak diinginkan.

Dalam Upaya lain yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya dalam penyusunan laporan keuangannya agar sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 ialah melakukan pengecekan oleh staf akuntansi senior ataupun rekonsiliasi setiap 3 bulan sekali guna untuk menghasilkan laporan keuangan yang sesuai standar dan mengantisipasi kesalahan yang terjadi.

Hal lain yang dilakukan ialah dengan menggunakan aplikasi yang telah dibuat guna untuk mempermudah dalam memasukan semua transaksi serta dalam proses penjurnalan. Dimana aplikasi ini tidak terlepas dari pantauan Teknik IT yang di dampingi oleh Akuntan ahli untuk memantau aplikasi supaya berjalan dengan baik serta kedepannya mengalami pembaruan sesuai dengan peraturan yang ada, dimana peraturan instansi pemerintah terus mengalami pembaruan.

Gambar berikut merupakan contoh aplikasi yang digunakan dalam proses penyajian laporan keuangan. Upaya tersebut telah dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga diperoleh hasil kualitas laporan keuangan yang baik dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010. Hal ini diperku bukti fisik yang ada yaitu laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).



Gambar 3
Aplikasi E-Accounting BPKAD Kota Surabaya
Sumber: Data sekunder diolah, 2023

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Surabaya mempunyai peran dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah Daerah menyajikan laporan keuangan daerah dibantuh oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 dengan menyajikan 7 laporan keuangan yang telah sesuai ketentuan yang ada, sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan asset daerah. Meskipun dalam penyajian laporan keuangan yang telah disajikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya sudah sesuai dengan standar yang ada, hal ini tidak terlepas dari kendala yang ada. Seperti kurang nya pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) mengenai awalnya perubahan dari yang tadinya menggunakan basis kas serta akrual dan dirubah menjadi basis akrual secara penuh. Akan tetapi hal tersebut masih bisa ditangani oleh instansi pemerintah. Seperti dilakukan upaya dengan melakukan pendampingan bagi Sumber Daya Manusia yang baru dan kurang paham mengenai penyajian laporan keuangan agar sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 13 yang didampingi oleh staf akuntansi senior maupun ketua akuntansi dari instansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya, baik secara online maupun offline apabila diperlukan Upaya lain juga terus dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya, dengan membuat aplikasi yang diberi nama e-accounting yang digunakan oleh pihak BPKAD Kota Surabaya dalam melakukan penyusunan laporan keuangan guna untuk mempermudah dalam proses penjurnalan transaksi-transaksi yang ada. Serta terus dilakukan pembaruan apabila adanya perubahan peraturan pemerintah mengenai penyusunan laporan keuangan, dan aplikasi ini tidak terlepas dari pantauan serta terus mengalami perbaikan oleh Teknik IT yang di dampingi oleh Akuntan ahli supaya aplikasi dapat berjalan dengan baik.

Keterbatasan

Selama penelitian ini dilakukan, peneliti mengalami keterbatasan-keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil dari penelitian. Keterbatasan-keterbatasan tersebut ialah: (1) Adanya beberapa peraturan dalam proses perizinan riset dalam instansi pemerintah yang harus diikuti, sehingga memakan banyak waktu untuk proses izin riset, (2) Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti hanya mengambil data laporan keuangan yang telah disajikan oleh

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya selama 4 periode akuntansi mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, (3) Adanya keterbatasan dalam wawancara yang dilakukan dilapangan. Yang pada awalnya direncanakan Narasumber seluruh Staf Akuntansi akan tetapi hanya memperoleh 7 Staf Akuntansi, (4) Adanya keterbatasan pengetahuan dari penulis dalam melakukan penelitian sehingga perlu diujikan kembali tentang keandalannya di masa depan.

Saran

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adapun saran yang dapat disampaikan yaitu: (1) Untuk peneliti selanjutnya apabila ingin melakukan penelitian di Instansi Pemerintahan sebaiknya menanyakan terlebih dahulu tentang persyaratannya sehingga lebih mempermudah dan mempercepat dalam pengurusan izin riset, (2) Diharapkan untuk peneliti selanjutnya menggunakan data yang berbeda dengan penelitian ini, serta memperbanyak pengambilan data bisa dengan 4 tahun lebih. Untuk menguji keandalan dari penelitian sebelumnya, (3) Diharapkan untuk peneliti selanjutnya memperluas wilayah penelitian, tidak hanya di Instansi Pemerintahan BPKAD Kota Surabaya melainkan di semua Instansi Pemerintahan lainnya seperti Malang, Gresik, Mojokerto, maupun wilayah yang lainnya baik yang berada di Provinsi Jawa Timur maupun lainnya, (4) Bagi Instansi Pemerintahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya diharapkan untuk lebih meningkatkan kinerja nya serta melakukan pengoptimalan dan pemeliharaan mengenai aplikasi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kusuma, J.D. dan N. Maulidah. 2023. Implentasi PSAP Nomor 13 Pada Penyajian dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Puskesmas Modopuro. *Student Research Journal* 1(2):68-77.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomer 129/PMK.05/2020 Tahun 2020 *Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum*. 18 September 2020. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomer 217/PMK.05/2015 Tahun 2015 *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum*. 2 Desember 2015. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2015. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomer 76/PMK.05/2008 Tahun 2008 *Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum*. 23 Mei 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76/PMK.05/2008. Jakarta.
- Peraturan Pemerintahan Nomer 23 Tahun 2005 *Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum*. 13 Juni 2005. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomer 23. Jakarta.
- Rahman, A., S.W.M. Ni, Fitriani, M. Mochamad, Sattar, A. Zainal, Irwanto, N.P. Anton, Indriana, L. Nurjanna, H. Eko, A.O.P. Ade, Ahmadani, dan A. Amtai. 2022. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Widina Bhakti Persada Bandung. Bandung.
- Respati, H. 2023. Laporan Keuangan Badan Layanan Umum. *Stiegiji Journal* 3(1):35-39.
- Selmita. 2022. *Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik*. 1nd ed. Media Sains Indonesia. Bandung.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Bisnis*. 3nd ed. Alfabeta. Bandung.
- _____. 2017. *Metode Penelitian Kebijakan*. 2nd ed. Alfabeta. Bandung.
- Suliyanto. 2018. *Metode Penelitian Bisnis Untuk Skripsi, Tesis, Disertasi*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Andi Offset. Yogyakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 2004 *Perbendaharaan Negara*. 14 Januari 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1. Jakarta.

Waluyo, B. 2014. Analisis Permasalahan pada Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. *Jurnal Infoartha* 3:27-38.